



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FITRIA RAHMAWATI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENELITIAN**
3. NHK : **808003**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
4. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI KATANA 4X2 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 7.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	928.871.156
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.721.371.156
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.721.371.156

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.